



PERJANJIAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS DI LAUT LEBANON

Menteri Energi Lebanon Walid Fayyad (kanan) dan Menteri Energi Qatar Saad Sherida Al-Kaabi (kiri) menandatangani perjanjian eksplorasi minyak dan gas di laut Lebanon, di Beirut, Lebanon, Minggu (29/1). Qatar menandatangani perjanjian dengan Lebanon pada hari Minggu untuk bergabung dengan konsorsium TotalEnergies Prancis dan ENI Italia untuk eksplorasi minyak dan gas di dua blok di perairan teritorial Lebanon, saluran TV milik negara Tele Liban melaporkan.

Tingkat Kelaparan di Suriah Melonjak ke Rekor Tertinggi

PBB memperkirakan 90 persen dari 18 juta orang di Suriah hidup dalam kemiskinan, dengan ekonomi dilanda konflik, kekeringan, kolera dan pandemi Covid.

DAMASKUS(IM)- Program Pangan Dunia (WFP) PBB telah memperingatkan bahwa tingkat kelaparan di Suriah telah melonjak ke rekor tertinggi.

Ini terjadi setelah lebih dari satu dekade konflik yang menghancurkan. Perang brutal yang memicu krisis ekonomi selama bertahun-tahun dan merusak

infrastruktur vital telah membuat 2,9 juta orang terancam kelaparan, sementara 12 juta lainnya tidak tahu dari mana makanan mereka selanjutnya, kata badan PBB itu.

Kelaparan melonjak ke level tertinggi dalam 12 tahun di Suriah karena 70 persen populasi mungkin akan segera tidak dapat menyediakan

makanan untuk keluarga mereka,” kata pernyataan itu, seperti dikutip dari AFP.

“Suriah sekarang memiliki jumlah penduduk rawan pangan tertinggi keenam di dunia, dengan harga pangan meningkat hampir 12 kali lipat dalam tiga tahun,” lanjut pernyataan itu.

Malnutrisi anak dan ibu juga meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam lebih dari satu dekade perang.

“Jika komunitas internasional tidak bertindak untuk membantu warga Suriah, mereka berisiko menghadapi gelombang migrasi massal

lainnya,” kata Direktur Eksekutif WFP, David Beasley saat berkunjung ke Suriah pada Minggu (29/1).

“Apakah itu yang diinginkan masyarakat internasional?” tanyanya. Ia mendesak negara-negara donor untuk melipatgandakan upaya untuk “mencegah bencana yang membayangi ini”.

PBB memperkirakan 90 persen dari 18 juta orang di Suriah hidup dalam kemiskinan, dengan ekonomi dilanda konflik, kekeringan, kolera dan pandemi Covid serta dampak dari kehancuran finansial di negara tetangga Lebanon.

Konflik di Suriah dimulai dengan represi brutal terhadap protes damai. Sekitar setengah juta orang telah terbunuh, dan konflik tersebut telah memaksa sekitar setengah dari populasi sebelum perang di negara itu meninggalkan rumah mereka.

Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan pada hari Sabtu bahwa sebuah laporan oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia yang menemukan rezim bertanggung jawab atas serangan senjata kimia di kota Douma pada tahun 2018 tidak memiliki bukti, dan membantah tuduhan tersebut. ● tom

Lima Pria Rusia Tinggal di Bandara Korsel Selama Berbulan-bulan Usai Mangkir dari Wajib Militer

MOSKOW (IM)- Lima pria yang melarikan diri dari Rusia usai pengumuman mobilisasi militer Moskow pada September lalu kini berada di Bandara Internasional Incheon Korea Selatan selama berbulan-bulan setelah pihak berwenang Seoul menolak menerima mereka.

Tiga warga Rusia tiba pada Oktober tahun lalu, sementara dua orang lainnya tiba di Korea Selatan pada November, kata pengacara mereka Lee Jong-chan. Lee mengatakan permohonan kliennya untuk status pengungsi ditolak oleh Kementerian Kehakiman Korea Selatan, sehingga membuat mereka terdampar di area keberangkatan selama berbulan-bulan sambil menunggu keputusan atas banding mereka.

“Mereka diberi satu kali makan sehari, yaitu makan siang. Tapi untuk sisa hari itu mereka hidup dari roti dan minuman,” ungkapnya, seperti yang dikutip dari CNN.

Mereka dapat mandi namun harus mencuci pakaian dengan tangan dan tidak dapat meninggalkan area keberangkatan dan bebas bea, tambah Lee.

“Mereka memiliki akses terbatas ke perawatan medis (dan) tidak ada dukungan untuk kesehatan mental mereka yang penting mengingat situasi genting mereka,” lanjutnya.

Mobilisasi parsial” warga Rusia untuk bertempur dalam perang melawan Ukraina memicu protes kemarahan dan memicu eksodus massal saat Moskow mengumumkan langkah tersebut pada September lalu. Banyak pria Rusia bergesah melintasi perbatasan darat negara itu atau membeli tiket pesawat ke luar negeri.

Data kolektif menunjukkan lebih dari 200.000 orang melarikan diri dari Rusia ke Georgia, Kazakhstan, dan Uni Eropa pada minggu pertama setelah mobilisasi diumumkan.

“Saya tidak mendukung apa yang terjadi, jadi saya memutuskan bahwa saya harus segera pergi,” kata seorang pria yang berangkat dari Rusia ke Belarusia dalam sebuah wawancara pada tahun lalu.

“Rasanya buruk karena

banyak teman saya, banyak orang tidak mendukung perang dan mereka merasa terancam oleh apa yang sedang terjadi, dan tidak ada cara denasional Incheon Korea Selatan menghentikan ini, bahkan untuk menyatakan protes Anda,” sambungnya.

Pria Rusia hingga usia 60 tahun tanpa catatan kriminal memenuhi syarat untuk wajib militer. Sementara pengalaman militer sebelumnya tidak selalu diperlukan. Tentara yang menolak untuk berperang dan kembali ke garis depan dilaporkan ditahan di ruang bawah tanah di wilayah penduduk Ukraina dan menghadapi tuduhan desersi, menurut kesaksian keluarga mereka.

Pria Rusia yang dibebaskan dari wajib militer antara lain mereka yang dihukum karena kejahatan seks terhadap anak di bawah umur, pengkhianatan, mata-mata atau terorisme.

Kementerian Kehakiman Korea Selatan telah menolak pengajuan warga-warga Rusia tersebut dan mengatakan “tidak layak untuk dievaluasi”, dengan alasan bahwa penolakan wajib militer bukanlah alasan untuk pengakuan pengungsi, ungkap Lee. “Penolakan mereka untuk kesehatan mental mereka yang penting mengingat situasi genting mereka,” lanjutnya.

Kelompok hak asasi manusia telah meminta pemerintah Korea Selatan untuk menerima para pria itu sebagai pengungsi. “Mereka langkah tersebut pada September lalu. Banyak pria Rusia bergesah melintasi perbatasan darat negara itu atau membeli tiket pesawat ke luar negeri.

Kementerian Kehakiman Korea Selatan telah menolak pengajuan warga-warga Rusia tersebut dan mengatakan “tidak layak untuk dievaluasi”, dengan alasan bahwa penolakan wajib militer bukanlah alasan untuk pengakuan pengungsi, ungkap Lee. ● gul

Seorang Mahasiswi di Rusia Masuk Daftar Teroris karena Kritik Tentara dan Anti Putin

RUSIA(IM)- Mahasiswa Universitas Federal Utara (Arktik), Olesya Krivtsova (19) dari wilayah Arkhangelsk, Rusia, menjadi tahanan rumah setelah didakwa atas postingan di media sosial yang dinilai mendiskreditkan tentara Rusia dan membenarkan terorisme Ukraina. Pejabat Rusia menambakkannya ke daftar teroris dan ekstremis, karena memposting Instagram story tentang ledakan di jembatan Krimea pada Oktober 2022.

Ia juga didakwa karena mengkritik Rusia yang menginvasi Ukraina. Olesya Krivtsova juga menghadapi tuntutan pidana karena mendiskreditkan tentara Rusia dalam obrolan siswa di jejaring sosial Rusia, Telegram.

Selama menjadi tahanan rumah, Olesya Krivtsova dilarang online dan menggunakan bentuk komunikasi lainnya. “Kasus Olesya Krivtsova bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir,” kata Alexei Kichin, pengacara Krivtsova, dikutip dari CNN Internasional.

Kichin mengatakan Olesya mungkin menghadapi hukuman tiga tahun penjara karena mendiskreditkan tentara Rusia dan hingga tujuh tahun penjara berdasarkan pasal pembenaan terorisme. Namun, pembelaan

hukum Krivtsova mengharapkan hukuman yang lebih ringan seperti denda.

Selain memposting kritikan terhadap tentara Rusia dan pemerintah, Olesya Krivtsova juga mengungkapkan kritiknya melalui tato di kaki kanannya. Olesya memiliki tato di pergelangan kaki lainnya bertuliskan “Kakak Sedang Mengawasi Anda”, dengan wajah Presiden Rusia Vladimir Putin menempel di tubuh sekor laba-laba.

Selama menjadi tahanan rumah, Olesya memakai gelang pelacak di pergelangan kaki kirinya. Karena tindakannya itu, Olesya dianggap sebagai teroris yang setara dengan ISIS, al Qaeda, dan Taliban.

Ia sedang menunggu persidangan atas tuduhan terorisme dan mendiskreditkan tentara Rusia, dikutip dari The Washington Post.

Olesya ditahan untuk kedua kalinya pada pertengahan Januari 2023, tiga bulan setelah teman-temannya mengambil tangkapan layar Instagram Story dan percakapan grup Telegram yang menampilkan komentar Olesya soal invasi Rusia terhadap Ukraina.

Pelanggaran Berulang

Ini bukan pertemuan pertama Olesya Krivtsova de-

ngan pihak berwenang karena menyiarkan pandangannya secara terbuka.

Pada Mei 2022 lalu, Olesya Krivtsova menghadapi tuntutan administratif karena mendiskreditkan tentara Rusia dengan menyebarkan poster anti-perang.

Masalah menjadi lebih serius ketika dia dituduh mendiskreditkan tentara Rusia di media sosial Oktober 2022 lalu. Menurut pengacara Krivtsova, pelanggaran berulang berdasarkan pasal yang sama berubah menjadi kasus pidana.

“Dia memiliki rasa keadilan yang tinggi, yang membuat hidupnya sulit. Ketidakmampuan untuk tetap diam sekarang menjadi dosa besar di Federasi Rusia,” kata ibu Krivtsova.

Sebelumnya, otoritas Rusia pernah menahan Olesya pada Desember 2022, ketika sekelompok petugas menggedor pintu apartemen yang dia tinggali bersama suaminya.

Dalam kasus Krivtsova, seorang hakim di pengadilan daerah Primorsky pada awalnya memutuskan untuk membatasi komunikasinya dan tidak membatasi pergerakannya, meskipun ada permintaan yang kuat dari penuntut, dikutip dari The Washington Post. ● ans



TARIAN NAGA DALAM PERAYAAN IMLEK DI PRANCIS

Seniman menampilkan tarian naga di luar Stadion Abbe Deschamps klub Auxerre sebelum pertandingan Ligue 1 Prancis antara Auxerre dan Montpellier sebagai bagian dari kegiatan Hari Tiongkok untuk merayakan Tahun Baru Imlek di Auxerre, Prancis, Minggu (29/1).

Azerbaijan Evakuasi Staf Kedutaan dari Iran

BAKU(IM)-Azerbaijan mengevakuasi staf kedutaan dan anggota keluarga mereka dari Iran pada Minggu (29/1) malam. Evakuasi berlangsung setelah seorang pria bersenjata menembak mati seorang penjaga keamanan dan melukai dua orang lainnya dalam sebuah serangan dua hari lalu.

Polisi di Teheran mengatakan, mereka telah menangkap seorang tersangka. Pria bersenjata itu memiliki motif pribadi, bukan politik.

Insiden itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara negara-negara tetangga atas perlakuan Iran terhadap etnis minoritas Azeri. Termasuk keputusan Azerbaijan menunjuk duta besar pertama untuk Israel.

Setelah serangan itu, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan memanggil duta besar Iran di Baku untuk menuntut keadilan dan mengevakuasi staf kedutaan dari Teheran. Sejah ini tidak ada rincian lebih lanjut apakah kedutaan akan terus ber-

fungsi. Sebelumnya, kementerian mengatakan penembakan itu adalah akibat dari kegagalan Teheran untuk mengindahkan seruan keamanan yang lebih baik. Rekaman CCTV yang diperoleh Reuters menunjukkan, penyerang memaksa masuk ke gedung kedutaan dan menembaki dua pria sebelum pegawai kedutaan menangkapnya.

Seorang pria berambut abu-abu yang diidentifikasi sebagai penyerang kemudian ditampilkan di televisi pemerintah Iran. Pemerintah mengatakan, pelaku telah bertindak untuk mengamankan pembebasan istrinya diyakini ditahan di kedutaan. Seorang wanita muda yang diidentifikasi sebagai anak perempuan pelaku mengatakan, ibunya berada di Azerbaijan.

Presiden Iran Ebrahim Raisi menyerukan “penyelidikan komprehensif” atas insiden itu. Dia menyampaikan belasungkawa kepada Azerbaijan dan keluarga korban. ● gul

Mantan PM Inggris Boris Johnson Mengaku Pernah Diancam Putin dengan Rudal

LONDON (IM) - Mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengaku pernah diancam dibunuh oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurut Johnson, ancaman itu disampaikan melalui panggilan telepon menjelang invasi Rusia ke Ukraina. Sebelum mendapat ancaman tersebut, Johnson sempat melawat ke Kyiv, Ukraina.

“Saya tidak ingin melukai Anda, tetapi dengan sebuah rudal, hal itu hanya butuh waktu satu menit,” demikian perkataan Putin menurut Johnson, dikutip dari Sky News, (30/1).

Johnson dikenal sebagai pendukung Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Dia pernah memperingatkan Putin bahwa tindakan invasi ke Ukraina akan membawa malapetaka. Di samping itu, invasi juga membuat Rusia dijatuhi sanksi yang lebih ketat oleh Barat.

Politikus Partai Konservatif itu juga berkata kepada Putin bahwa eskalasi di Ukraina hanya akan membuat Barat makin mendukung Ukraina. Dia turut menyinggung kemungkinan Ukraina bergabung dengan organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

“Dia (Putin) berkata, ‘Boris, Anda berkata bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat. Apa maksudnya dalam waktu dekat?’ dan saya berkata, ‘Jadi, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat. Anda tahu bahwa itu dengan sangat baik,’” kata Johnson.

“Dia seperti mengancam saya dan berkata, ‘Boris, saya

tidak ingin melukaimu, tetapi dengan sebuah rudal, hal itu hanya akan membutuhkan satu menit’, atau sesuatu seperti itu,” kata dia.

Awal bulan ini Johnson mengadakan kunjungan ke Ukraina secara tiba-tiba. Dia mengaku mendapat “privilese” lantaran diundang oleh Zelenskyy. Johnson dan Zelenskyy dikenal bersahabat baik.

Kantor PM Inggris mengindikasikan bahwa PM saat ini, Rishi Sunak, mendukung kunjungan Johnson ke negara bekas Uni Soviet itu. Sebelumnya, Sunak mengklaim bahwa kunjungan itu bisa mengganggu kewenangannya dalam kebijakan luar negeri.

Johnson terlihat mengunjungi Kota Borodianska di dekat Kyiv. Kota itu rusak parah akibat invasi Rusia.

Dia berujar, “Penderitaan warga Ukraina sudah berlangsung terlalu lama.”

“Bagi Ukraina, satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ialah dengan memenangkannya, dengan memenangkannya secepat mungkin. Inilah saatnya untuk menggandakan dan memberikan seluruh peralatan yang diperlukan warga Ukraina untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.”

Seorang juru bicara Johnson mengatakan mantan PM itu mendukung penuh kebijakan Inggris untuk mengirim tank Challenger 2 ke Ukraina.

Johnson menyebut dirinya sebagai sekutu penting Ukraina ketika dia masih menjadi PM. Dia memberikan bantuan serta meminta Barat untuk mengikuti jejaknya. ● ans

Taliban Larang Kaum Perempuan Ikut Ujian Masuk Universitas

KABUL(IM) - Kementerian Pendidikan Tinggi yang dikelola Taliban memerintahkan universitas swasta di Afghanistan untuk tidak mengizinkan siswa perempuan mengikuti ujian masuk universitas. Ujian itu dijadwalkan akan berlangsung pada bulan depan.

Seperti dilaporkan Reuters, sebuah surat dari kementerian ditujukan kepada lembaga-lembaga di provinsi utara Afghanistan, termasuk Kabul, tempat ujian akan berlangsung mulai akhir Februari. Surat itu mengatakan lembaga-lembaga yang tidak mematuhi aturan akan menghadapi tindakan hukum.

Kementerian Pendidikan Tinggi pada bulan Desember mengatakan kepada universitas untuk tidak mengizinkan mahasiswa mengikuti perkuliahan “sampai pemberitahuan lebih lanjut”. Beberapa hari kemudian, pemerintah menghentikan sebagian besar pekerja LSM perempuan untuk bekerja. Sebagian besar sekolah menengah perempuan juga telah ditutup oleh pihak

berwenang. Kondisi ini kian membuat kaum wanita Afghanistan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Pembatasan terhadap pekerjaan dan pendidikan perempuan telah menandai kecaman internasional.

Diplomat Barat telah memberi isyarat bahwa Taliban perlu mengubah arah kebijakannya terhadap perempuan untuk mendapatkan kesempatan pengakuan internasional formal dan pelanggaran isolasi ekonominya.

Negara ini berada di tengah krisis ekonomi, sebagian karena sanksi yang mempengaruhi sektor perbankan dan pemotongan dana pembangunan, dengan peringatan lembaga bantuan puluhan juta membutuhkan bantuan mendesak. Namun, laporan Bank Dunia minggu ini juga mengatakan pemerintahan Taliban, yang mengatakan lebih fokus pada swasembada ekonomi, telah mempertahankan pengumpulan pendapatan yang kuat tahun lalu dan ekspor meningkat. ● gul